

# STRATEGI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (DKISP) DALAM MENGEMBANGKAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DI KABUPATEN PASER

Triyani Nur Riyantiningrum<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Mengembangkan Electronic Government di Kabupaten Paser dengan teknik penelitian campuran sekuensial bertahap (sequential mixed methods), yaitu teknik yang menggabungkan dua metode secara bertahap (pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser. Analisis data pertama penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaksi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan selanjutnya yaitu teknik kuantitatif SWOT yang terdiri dari Tahap Pengumpulan Data, Tahap Analisis dan Matriks SWOT yang dikembangkan oleh Freddy Rangkuti, 2017. Berdasarkan hasil IFAS dan EFAS Matrix, diketahui bahwa nilai internal lebih besar daripada nilai eksternal, maka dari itu diketahui bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser berada pada posisi yang baik (Kuadran I). Dengan kata lain keadaan yang paling menguntungkan dan sangat mendukung untuk menerapkan strategi agresif dimana kekuatan yang dimiliki dapat digunakan untuk meraih peluang yang ada.*

**Kata Kunci:** *Strategi, e-Government, SWOT.*

## **Pendahuluan**

Dalam aspek *Government to Citizen* yang semestinya untuk memperbaiki komunikasi pemerintah dengan masyarakat, tetapi nampak bahwa pelayanan pengaduan memiliki beberapa kekurangan. Seksi untuk melapor pengaduan warga baik dari website ataupun melalui SMS sulit untuk ditemukan sehingga menghambat proses kemajuan dan pembangunan dari aspirasi masyarakat. Selain itu, pada aspek desiminasi informasi publik, terdapat beberapa daerah terpencil yang tidak memiliki jaringan internet untuk mendapatkan akses berbasis internet,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: triyaninurrr3333@gmail.com

bahkan tidak mudah untuk mendapatkan jaringan penyiaran radio sekalipun sehingga sulit untuk mendapatkan pelayanan berbasis internet dengan cepat.

Keadaan yang dihasilkan dari permasalahan tersebut mengakibatkan implementasi *e-Government* bersifat stagnan. Penyelenggaraan *e-Government* yang tidak dijalankan dengan baik dapat memicu kegagalan target kebijakan *e-Government* dan tidak sejalan dengan strategi organisasi. Keadaan *digital divide* merupakan keadaan dimana masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan global yang berhubungan dengan teknologi dan informasi sehingga menimbulkan kesenjangan pengetahuan antar individu maupun masyarakat yang mengetahui digital dan yang tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, manfaat yang ditawarkan oleh *e-Government* tidak dapat dirasakan dikarenakan pelayanan informasi dan pelayanan publik melalui internet tidak dimanfaatkan seluruhnya dan susah untuk diakses bagi beberapa daerah tertentu. Tentunya hal tersebut berdampak kepada kehidupan masyarakat, karena penggunaan *e-Government* dengan baik dapat digunakan untuk mencari berbagai macam informasi seperti lowongan kerja, kegiatan sipil dan peningkatan perekonomian melalui hubungan dengan kewirausahaan.

Dari persoalan yang muncul maka diperlukannya strategi sebagai awal untuk pelaksanaan pengelolaan kebijakan. Strategi secara sederhana diartikan sebagai segala hal yang berurusan dengan perencanaan dan pelaksanaan sebuah aktivitas pada kurun waktu tertentu. Strategi sebagai sebuah proses merupakan tindakan-tindakan dengan tujuan dan disusun secara sistematis oleh pihak instansi. Pada proses penerapannya, strategi berguna sebagai ‘penunjuk arah’ untuk masa kedepannya yang dituju, membantu instansi agar lebih mudah beradaptasi seandainya terjadi masalah, instansi menjadi lebih aktif, serta meningkatkan kemampuan instansi secara keseluruhan. Dinamika pengembangan *e-Government* merupakan suatu hal yang membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang mendetail dan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh pihak pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga dapat memperbaiki hubungan antara ketiga pihak tersebut. Maka dari itu, diperlukan implementasi strategi yang holistik dengan mengetahui dan menganalisis strategi-strategi yang diterapkan dengan mempertimbangkan keadaan internal (kekuatan dan kelemahan) dan kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) yang dimiliki oleh DKISP. Maka dari itu strategi merupakan hal yang sangat diperlukan agar pencapaian tujuan dapat berjalan dengan lancar, terutama pada DKISP dimana dinas tersebut menjadi *leading sector* dalam mengembangkan *e-Government*.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Strategi***

Menurut Ismail (2012:64) strategi (*strategy*) dipahami bukan hanya sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan (*ways to achieve ends*) melainkan mencakup pula penentuan berbagai tujuan itu sendiri. Strategi dipahami pula sebagai sebuah pola yang mencakup di dalamnya baik strategi yang direncanakan

(*intended strategy and deliberate strategy*) maupun strategi yang awalnya tidak dimaksudkan (*emerging strategy*) tetapi menjadi strategi yang dipertimbangkan bahkan dipilih untuk diimplementasikan (*realized strategy*). Sedangkan dari pendapat David (2011:18) strategi diartikan sebagai aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun ke depan, dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan, baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Joni dalam Anitah (2008:124), dimana strategi adalah ilmu atau kiat didalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan beberapa ahli diatas maka dapat dilihat bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang yang di bentuk perusahaan maupun suatu organisasi guna mencapai tujuan visi dan misi perusahaan ataupun suatu organisasi. Strategi sangat berpengaruh kepada hasil kinerja suatu perusahaan/organisasi tersebut, baik secara internal maupun eksternal.

### ***Manajemen Strategi***

Menurut Aimeed Heene dan Sebastian (2010:9-10), manajemen strategi adalah kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya Robbins (2007:218) mengemukakan bahwa manajemen strategis adalah sekelompok keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategis penting karena dapat membuat perbedaan dalam seberapa baik kinerja suatu organisasi dan berhubungan dengan kenyataan bahwa organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi situasi yang terus berubah.

Dari pendapat-pendapat diatas terlihat bahwa manajemen strategi merupakan segala tindakan dan keputusan manajerial yang dibutuhkan seluruh perusahaan ataupun organisasi dengan tujuan mencapai sasaran organisasi.

### ***Pelayanan Publik***

Ratminto dan Winarsih (2005:5) mengartikan pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Pelayanan publik menurut Sinambela (2010:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Agung Kurniawan dalam Harbani Pasolong (2013:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturannya pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, baik pusat maupun daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik tersebut dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

### ***Konsep Electronic Government***

#### ***Pengertian e-Government***

*E-Government* merupakan kependekan dari *Electronic Government*, beberapa meningkatnya menjadi E-Gov, elektronik pemerintah dan pemerintahan elektronik dan lain sebagainya. *E-Government* merupakan transformasi penyelenggaraan pemerintah dari yang bersifat konvensional menjadi yang bersifat teknologi informasi.

Dalam Indrajit (2004:2), UNDP (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan *e-Government* sebagai “*e-Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.*” yang berarti penggunaan *e-Government* digunakan oleh pemerintah dalam urusan administrasi, pelayanan serta pengendalian sumber daya milik organisasi yang kemudian diawasi dan dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam Richardus Eko Indrajit (2004:3), menurut Zweers dan Planque mendefinisikan *e-Government* sebagai yang “berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan.” Hal tersebut sejalan dengan yang ditentukan oleh *website World Bank* (2015) yang mengartikan *e-Government* sebagai:

*“e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption,*

*increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions.*”

Artinya *e-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti jaringan area luas, internet, dan komputasi bergerak) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warganegara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi-teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk hasil lainnya: penyampaian pelayanan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan interaksi dengan sektor bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses pada informasi, atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Hasil yang didapat dapat berupa berkurangnya korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan pertumbuhan pendapatan, dan/atau pengurangan biaya. Pengertian menurut World Bank pada dasarnya mengartikan *e-Government* sebagai pemerintah yang menggunakan teknologi informasi yang digunakan untuk mereformasi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta seperti (misalnya: Wide Area Network, Internet dan *mobile computing*). Hal tersebut sejalan dengan definisi *e-Government* menurut Douglas Holmes. Menurut Holmes, (2001:2) *e-Government* yaitu, *electronic government is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much convenient, customer-oriented, cost-effective, and althogheter different and better way*. Yang berarti *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi terutama internet, untuk mengantarkan pelayanan publik dengan jalan yang lebih mudah, berorientasi-pelanggan, hemat biaya, dan secara keseluruhan menjadi lebih baik.

### ***Konsep Pengembangan e-Government***

*E-Government* merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Maka dalam kebijakan ini diperlukan suatu acuan yang menjadi pertimbangan kebijakan tersebut.

Dalam Indrajit (2004:15-16) berdasarkan riset dari *Harvard JFK School of Government* implementasi *e-Government* memiliki tiga elemen sukses, antara lain:

1. *Support*, yaitu keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar mengikuti *trend* atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya unsur “*political will*” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “*top down*”.
2. *Cappacity*, yaitu berbagai unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “*impian*” *e-Government* yaitu sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya infrastruktur.

3. *Value*, yaitu berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-*demand side*).

### **Good Governance**

*Good governance* pada dasarnya berarti tata pemerintahan yang baik. Menurut Mas'ood (2003:105) *good governance* diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggungjawab pada publik. Dalam Widodo (2001:18), Ganie-Rochman mengatakan konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik) melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor luar pemerintah dan negara, sehingga pihak yang terlibat sangat luas. Dengan pihak yang terlibat sangat luas ini berarti kekuasaan terbagi secara menyeluruh.

Bila dipilah lagi, menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Sedamayanti (2012:3) mengemukakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua makna:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintah efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian *mix methods* (penelitian campuran) yang bertujuan memahami lebih dalam mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dengan dua metode pendekatan (kualitatif dan kuantitatif) dalam satu penelitian.

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian. Adapun fokus penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengembangkan *E-Government*, meliputi:
  - a. Mengembangkan pelayanan publik yang handal berbasis TIK
  - b. Menata sistem dan proses kerja Pemerintah Daerah secara *holistic*
  - c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
  - d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
  - e. Mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkup Pemerintahan.

2. Mengidentifikasi alternatif strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengembangkan *e-Government* di Kabupaten Paser

### **Hasil Penelitian**

#### ***Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Mengembangkan e-Government***

##### *Mengembangkan Pelayanan Publik yang Handal Berbasis TIK*

Strategi untuk mengembangkan *e-Government* di Kabupaten Paser merupakan upaya pemerintah daerah Kabupaten Paser terhadap pelaksanaan kebijakan *e-Government* yang mengacu pada Masterplan *e-Government* Kabupaten Paser dan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Berdasarkan wawancara dengan narasumber dapat digambarkan strategi pengembangan pelayanan publik dengan cara, antara lain;

##### **Pembangunan Website dan Aplikasi Berbasis Web**

pembangunan pelayanan online dapat dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam membangun aplikasi berbasis web, ada dua cara yang dapat dilakukan bagi instansi terkait; pertama dengan subdomain go.id yang dapat dibentuk mandiri menggunakan email resmi pemerintah dan yang kedua menggunakan subdomain Pemerintah Daerah, dimana prosesnya yaitu dengan mengajukan permohonan subdomain kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian dan selanjutnya dapat diisi dengan berbagai informasi yang diinginkan dan dibutuhkan. Selain itu, setiap layanan yang ada harus memiliki logo pemerintahan sebagai identitas dan informasi umum tentang instansi tersebut. Lebih lanjut, dalam Masterplan Pengembangan *e-Government* 2018-2022 bahwa pembuatan pelayanan elektronik pada saat ini yang disesuaikan dengan prioritas pengembangan system.

Kemudian berdasarkan Daftar Kecamatan dengan Website yang Tersedia dapat dilihat bahwa dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Paser telah terbentuk seluruhnya. Selain pembuatan website, dalam hal pengembangan web yang telah ada terdapat beberapa hal yang difokuskan dalam kualitas aplikasi berbasis web berupa antara lain; mengisi, pemenuhan modul dan fitur yang sekiranya diperlukan pada website dan aplikasi Perangkat Daerah serta peningkatan performa aplikasi yang terlihat dan dirasakan lambat ketika dikunjungi.

##### **Pembangunan Aplikasi *Mobile***

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada informan, pembangunan aplikasi dan lainnya membutuhkan perencanaan, perencanaan tersebut antara lain, pembangunan dan pengembangan aplikasi dengan target dan kategori tertentu. Aplikasi dengan kategori pengguna dan target pengguna G2G (*Government to Government*), G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government*

to *Bussiness*) yang digunakan saat ini dan nantinya akan dikembangkan kembali antara lain: aplikasi G2G sebanyak 51, G2C sebanyak 19, G2B sebanyak 4.

#### *Menata Sistem dan Proses Kerja Pemerintah Daerah Secara Holistik*

Dari wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa agar upaya penataan sistem kerja dilakukan dengan penataan organisasi perangkat daerah dengan kata lain penetapan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dinas terkait.

Berhubung dengan pengembangan struktur organisasi dan tata kelola TIK, dalam *Masterplan e-government* Kabupaten Paser tahun 2018-2021 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu pada Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional yang diundangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 yang memberikan arahan dengan substansi sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan *leadership*, setiap institusi pemerintahan harus menetapkan seorang *Chief Information Officer* (CIO) yang bertugas mengoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal TIK di institusinya masing-masing, bekerja sama dengan satuan kerja TIK dan satuan kerja pengguna lainnya.
2. Berkaitan dengan hubungan sinergis antar satuan kerja dalam satu institusi atau hubungan sinergis antar institusi, setiap institusi pemerintahan diharuskan membentuk Komite TIK sebagai wada kepentingan satuan kerja TIK dan satuan kerja pengguna TIK, serta mengoordinasikan perencanaan dan operasional inisiatif TIK strategi institusi.

#### *Memfaatkan Teknologi Informasi Secara Optimal*

##### Peningkatan Keamanan Informasi

Terkait dengan keaman data, terkait dengan keamanan mengacu pada standar keaman Permen Kominfo No.4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dimana adanya kewajiban untuk menerapkan dan memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia) Berbahasa Indonesia ISO (*the International Organization for Standarization*) 27001 yang bersifat universal. Keamanan Sistem Informasi berdasarkan standar ISO 27001 berisi rincian dan standar tentang pengendalian keamanan informasi, dimana kontrol ISO 27001 meliputi antara lain; kebijakan kewanaman informasi, kewanaman informasi organisasi, keamanan Sumber Daya Manusia, manajemen aset dan kewanaman komunikasi. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam keamanan yang dimaksud adalah:

1. Kerahasiaan—dimana informasi dilindungi dan tidak dapat diakses bagi mereka yang tidak memiliki wewenang
2. Integritasi—informasi yang digunakan bersifat akurat dan lengkap
3. Ketersediaan—menyediakan informasi hanya bagi pihak yang berwenang untuk digunakan

Langkah yang dilakukan setelah peningkatan software yaitu dengan mengadakan audit dengan menggunakan aparatur yang tersedia di Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Audit yang dilakukan terhadap sistem pelayanan yang berjalan dan menilainya secara obyektif apakah sistem elektronik tersebut berjalan secara aman. Audit dilakukan dengan menerapkan beberapa teknik/keahlian yang dimiliki petugas agar mengenali dan mengevaluasi risiko keamanan sistem informasi agar selanjutnya dapat segera ditindaklanjuti. Sedangkan audit yang dilakukan adalah yang meliputi kerahasiaan sistem elektronik, integritas sistem elektronik dan ketersediaan sistem elektronik.

Evaluasi yang dilakukan mengenai implementasi dan pengendalian manajemen keamanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015 mengenai Audit atas Keamanan Komunikasi, antara lain:

1. Jaringan telah dikelola dan dikendalikan untuk melindungi informasi dalam sistem dan aplikasi
2. Mekanisme keamanan, tingkat layanan dan persyaratan manajemen dari semua layanan jaringan telah diidentifikasi dan dimasukkan dalam perjanjian layanan jaringan, baik layanan ini disediakan mandiri ataupun alih daya.
3. Kelompok-kelompok layanan informasi, pengguna dan sistem informasi telah dipisahkan di dalam jaringan.
4. Audit dilakukan oleh petugas keamanan dan dilakukan dalam waktu yang berkala.

Peningkatan Jaringan Komunikasi yang Ada

Pemerataan jaringan pemerintah dilaksanakan dengan tujuan menyediakan jaringan internet yang berkualitas kepada masyarakat. Pemerataan jaringan yaitu melalui pengembangan infrastruktur jaringan melalui menggunakan model Hierarchical Internet working Model, dengan peningkatan kecepatan internet sebesar 900 Mbps dan sekitar 30 Mbps per perangkat kerja. Pengembangan jaringan internet yang terfokus pada tiga fungsional area atau lapisan jaringan, antara lain:

1. Ring-1, area utama disekitar komplek kantor bupati dan komplek kantor terpadu, Ring 1 mencakup jaringan komunikasi kantor instansi pemerintah yang memiliki proses komunikasi yang sangat tinggi/penting, seperti kantor bupati, SKPD yang ada dikomplek kantor bupati.
2. Ring-2, area Perangkat Daerah diluar komplek kantor bupati dan diluar komplek kantor terpadu yang dipergunakan bagi kantor instansi teknis/Perangkat Daerah
3. Ring-3, area kecamatan, kelurahan, perangkat daerah yang lebih luar. Ring 3 digunakan untuk kantor pemerintah dan kantor-kantor lain yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah dan lain-lain.

### *Meningkatkan Peran Serta Dunia Usaha dalam Pengembangan Industri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi*

Dalam membangun aplikasi berbasis *commerce* ini pemilihan teknologi/perangkat lunak yang digunakan yaitu dengan yang digunakan yaitu merupakan berlisensi *open source*. *Open source* adalah perangkat lunak dimana kode sumber dan kontennya dapat digunakan dan tersedia secara bebas di internet dengan kata lain integrasi data yang dapat digunakan oleh satuan kerja terkait. Penggunaan sistem *open source* digunakan agar dapat mendukung layanan yang interoperabilitas, dimana adanya kebebasan dan pilihan bagi lintas perangkat daerah lain agar dapat mengembangkannya.

Selain diadakannya pembangunan aplikasi guna meningkatkan *commerce*, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengajak pihak bisnis untuk bekerja sama dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat maka terdapat beberapa informasi-informasi yang diwajibkan untuk diumumkan

### *Mengembangkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkup Pemerintah*

Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan dengan pihak luar baik itu instansi luar daerah dan pihak swasta yang mencakup pengembangan aplikasi, penyediaan konten digital, dan inovasi yang dianggap tepat dalam pengembangan daerah Kabupaten Paser.

### *Analisis SWOT Strategi Pengembangan e-Government di Kabupaten Paser*

Statistik dan Persandian Kabupaten Paser ada di Kuadran I, yang berarti strategi digunakan dengan mendukung pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Kondisi ini merupakan situasi yang paling unggul dan fokus strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah dengan terus melakukan pengembangan yang mencakup pengembangan kemampuan, sumber daya dan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas yang disediakan pemerintah. Alternatif strategi ini dapat digunakan untuk menggunakan dan memaksimalkan kondisi kekuatan dan peluang yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

#### ***Strategi Pengembangan e-Government***

1. Pengembangan pelayanan publik yang handal berbasis TIK. Pengembangan tersebut dilakukan dengan cara pertama mengembangkan website dan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui komputer dan yang kedua yaitu mengembangkan aplikasi berbasis *mobile* dengan kategori *front office* dan *back office*. Pengembangan dan pembentukan aplikasi web dan *mobile* disesuaikan dengan tingkat prioritas yang dilakukan secara bertahap.

2. Menata sistem dan proses kerja Pemerintah Daerah secara holistik dilaksanakan dengan penataan dan perbaikan manajemen dimana terdapat tim yang dibentuk dalam pengembangan *e-Government*. Dengan kata lain, perbaikan manajemen mencakup perbaikan struktur organisasi dan tata kelola TIK baik yang didalam dinas dan diluar dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dilakukan dengan meningkatkan pengamanan informasi yang memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia) Berbahasa Indonesia ISO (*the International Organization for Standarization*) 27001. Selanjutnya dengan meningkatkan jaringan komunikasi yang ada melalui LAN (*Local Area Network*) dan *Hierarchical Internet Working Model*.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pengembangan industry telekomunikasi dan teknologi informasi dengan cara membangun aplikasi yang berbasis *commerce* dan bersifat *front office* yang disesuaikan dengan urutan prioritas pembangunan dan dengan menggunakan teknologi dengan data terbuka sehingga dapat digunakan oleh lintas perangkat daerah yang lain agar mendukung interoperabilitas aplikasi.
5. Mengembangkan kapasitas dan kualitas SDM lingkup pemerintahan dilaksanakan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur yang memiliki jabatan pada bidang Teknologi Informatika dan Statistika dalam mengembangkan *e-Government*. Jenis pelatihan yang dilakukan dan akan dilakukan antara lain pelatihan dasar, pelatihan pemeliharaan, dan pelatihan advance.

### ***Alternatif Strategi***

1. Strategi SO
  - a. Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat umum dan masyarakat yang ada di daerah terpencil dengan jaringan internet yang rendah dalam cara menggunakan dan memanfaatkan internet dan informasinya dengan bijak.
  - b. Meningkatkan kualitas penyediaan layanan informasi dengan melakukan perawatan, update dan menambahkan fitur-fitur baru untuk pengaduan seperti pengaduan masyarakat serta menambahkan hubungan (*link*) dengan instansi lainnya yang belum terhubung.
  - c. Meningkatkan kordinasi dan hubungan antar SKPD dan partisipasinya dalam optimalisasi integrasi kebijakan *E-Government* seperti penyediaan rancangan layanan aplikasi/konten melalui internet dan konsultasi TIK untuk mencari solusi masalah bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Strategi ST
  - a. Memaksimalkan pelaksanaan dan pengawasan program dinas untuk menghindari pengembangan kebijakan yang stagnan.

- b. Mempertahankan hubungan kerja sama yang baik antara SKPD untuk menjalankan semua urusan antar SKPD dengan lancar.
  - c. Meningkatkan dan menciptakan SDM yang berkualitas terutama di bidang TIK.
3. Strategi WO
- a. Mengupayakan peningkatan kerja sama dengan stakeholder sebagai penyalur, pemilik modal atau rekanan untuk mendukung rencana pengembangan TIK.
  - b. Meningkatkan intensitas pelatihan dan jumlah SDM yang dapat berpartisipasi dalam pelatihan TIK.
  - c. Mengembangkan media informasi untuk memperluas penyebaran informasi dan kedepannya untuk dapat berkomunikasi antara masyarakat dan pemerintah guna meningkatkan kepuasan masyarakat dan penyampaian aspirasi masyarakat.
4. Strategi WT
- a. Meningkatkan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) secara proaktif untuk menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi di daerah terpencil.
  - b. Membuka lowongan pekerjaan sebagai aparatur yang berkompeten dalam bidang TI.
  - c. Membuat SOP yang layak dan sesuai dengan keadaan dinas sehingga kegiatan peningkatan TIK agar mendapatkan kinerja yang maksimal.

### **Saran**

1. Kian membangun aplikasi-aplikasi dengan tujuan memajukan kemasyarakatan seperti *e-education* dan *e-health* dan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang ada dengan menambahkan beberapa fitur yang lebih baik lagi dalam segi pemanfaatannya agar tidak terjadi keadaan pelayanan berbasis elektronik yang stagnan. Pengembangan aplikasi dan fitur tersebut dapat dilakukan melalui eksperimen-eksperimen baru lalu mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan aplikasi/fitur tersebut. Melihat dari *best practice e-Government* di Surabaya, Kabupaten Sragen dan Kota Yogyakarta, beberapa aplikasi yang dapat dipraktekkan antara lain yang bergerak pada transaksi dua arah antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah kepada bisnis seperti aplikasi manajemen sumber daya, pemberian materi belajar baik online maupun offline dan lain sebagainya.
2. Memaksimalkan kerjasama lintas Perangkat Daerah terkait interoperabilitas implementasi *e-Government* di Kabupaten paser. Diharapkan masing-masing instansi dapat ikut berpartisipasi dengan menyediakan portal pemerintah. Sedangkan bagi yang sudah memiliki portal untuk terus menyediakan berbagai informasi-informasi yang diwajibkan untuk diumumkan sesuai dengan peraturan berlaku (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

- tentang Standar Layanan Informasi Publik) melalui portal tersebut secara berkala dan memperbarui informasi setidaknya satu kali dalam sebulan.
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian beserta Perangkat Daerah lainnya perlu meningkatkan sistem keamanan fasilitas online dalam pengadaan pelayanannya dengan menggunakan SSL (HTTPS) dan membentuk sistem otentifikasi dua kali. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memprioritaskan beberapa website yang memerlukan bagi website yang membutuhkan *login* baik sebagai admin atau pengguna terutama dalam pelayanan transaksi dua arah dan pelayanan yang berkaitan dengan pertukaran data di internet.
  4. Melakukan negosiasi dan ajakan kepada beberapa instansi yang berhubungan dengan layanan *e-Government* dengan bidang bisnis dengan berinisiatif untuk mendatangkan beberapa pegawai dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ke tempat instansi tersebut untuk memberikan pemahaman serta bimbingan teknis mengenai peningkatan karakteristik utama dalam transaksi bisnis agar meningkatkan kepercayaan pihak swasta kepada pemerintah. Karakteristik yang perlu ditingkatkan antara lain adalah menunjukkan identitas portal dan selayang pandang secara serta-merta dan memastikan bahwa data yang diberikan akurat dan tidak ada perubahan selama transaksi data, dan data sensitif tidak boleh diakses bagi yang tidak bersangkutan.
  5. Mengikutsertakan pegawai lain dalam mengerjakan berbagai pekerjaan dengan kemampuan dasar (seperti input data, dsb) kemudian secara bertahap mengerjakan pekerjaan dengan tingkat lebih tinggi yang diawasi oleh petugas yang mempunyai kemampuan memumpuni dengan menjalankan komunikasi dan konsultasi antara pihak yang bersangkutan. Selain itu seluruh pegawai disarankan memiliki target kerja dan adanya pemberian apresiasi pegawai dan kelompok kerja yang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu sehingga dapat memotivasi karyawan atau kelompok kerja tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

- Anitah, Sri. 2008. *Media Pembelajaran*. Surakarta: Yuna Pustaka.
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategis Konsep (Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heene, Aimeid dan Desmidt, Sebastian, 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, dialih bahasakan oleh Faisal Afiff. Bandung : PT Refika Aditma.
- Holmes, Douglas. 2001. *eBusiness Strategies for Government*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Indrajit, Richardus Eko 2004. *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mas'ood, Mochtar. 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sedamayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi"*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambela, L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publok; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.

**Sumber Internet:**

<http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government> (diakses tanggal 30 Oktober 2017)

**Sumber Dokumen:**

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.
- Masterplan e-Government* Kabupaten Paser tahun 2018-2022.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Audit Manajemen Keamanan Sistem Elektronik pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Rencana Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, statistic dan Persandian Kabupaten Paser tahun 2016-2021.
- Peraturan Menteri Komunikasi, dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.